



**BUPATI INDRAGIRI HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU  
NOMOR 86 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU  
NOMOR 76 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN KAS PERUBAHAN  
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAGIRI HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyatakan “Dalam hal pemerintah daerah belum menganggarkan Kegiatan Pemilihan dalam Perda tentang perubahan APBD atau telah menganggarkan Kegiatan Pemilihan dalam Perda tentang perubahan APBD tetapi belum sesuai dengan standar satuan harga kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran dengan mengubah Perkada tentang penjabaran perubahan APBD” yang perlu ditindaklanjuti dengan perubahan anggaran kas perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/9629/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati/Walikota Tahun 2020;
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 56/900/TAPD/X/2019 / 109/KU/.01.1-BA/1402/Kab/X/2019 tentang Besaran Dana Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, perlu ditindaklanjuti;
  - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 64/900/TAPD/XI/2019 / 01/RI-03/BA/XI/2019 tentang Besaran Dana Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, perlu ditindaklanjuti;
  - e. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penyediaan Dana Pilkada Tahun 2020;

f. bahwa ...

- f. bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 01/BPKAD-NPHD/X/2019  
01/KU.07-SPJ/1402/KPU-Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020, perlu ditindaklanjuti;
- g. bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 02/BPKAD-NPHD/XI/2019  
001/K.RI-03/KU.00.01/XI/2019, tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020, perlu ditindaklanjuti;
- h. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 364/P/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor: 320/P/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afiriasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019, telah ditetapkan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afiriasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019 untuk Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sehingga perlu ditindaklanjuti;
- i. bahwa berdasarkan Berita Acara TAPD tanggal 01 November 2019 tentang Perubahan Penjabaran Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2019 disepakati bahwa perlu dilakukan perubahan atas Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2019 dan ditindaklanjuti dengan perubahan anggaran kas;
- j. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 76 Tahun 2019 tentang Anggaran Kas Perubahan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2019;

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 507);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 9);
20. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 75);

MEMUTUSKAN : ...

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 76 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN KAS PERUBAHAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2019**

**Pasal I**

- (1) Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 76 Tahun 2019 tentang Anggaran Kas Perubahan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 76) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 76 Tahun 2019 tentang Anggaran Kas Perubahan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 76) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	day	KEPALA DINAS .....	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	✓
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 5 November 2019

**BUPATI INDRAGIRI HULU**

**H. YOPI ARIANTO**

Diundangkan di Rengat  
pada tanggal 5 November 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**H. HENDRIZAL**

**BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2019 NOMOR 86**

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULLU**  
**ANGGARAN KAS PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULLU  
 NOMOR : 86 Tahun 2019  
 TANGGAL : 5 November 2019

NO	NAMA PD	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	JUMLAH
1		91,513,667,271.26	119,945,738,370.32	166,263,739,328.90	111,697,777,646.56	489,420,922,617.04
2	Dinas Kesehatan	44,216,365,095.91	44,829,121,755.52	36,717,282,378.52	35,753,596,788.80	161,516,366,018.75
3	RSUD Indrasari Rengat	28,401,788,211.18	40,993,108,065.60	29,284,206,961.41	28,911,652,523.25	127,590,755,761.44
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	69,028,411,729.17	92,742,175,190.02	31,127,447,216.77	19,250,083,410.58	212,148,117,546.54
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2,827,136,416.26	6,453,217,279.34	2,551,609,937.95	2,650,965,782.76	14,482,929,416.31
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,783,403,449.67	1,906,161,693.59	1,267,711,677.63	1,404,949,932.11	6,362,226,753.00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	5,246,103,394.03	5,980,753,455.63	5,570,260,305.65	4,965,988,720.53	21,763,105,875.84
8	Kantor Penanggulangan Bencana Daerah	1,919,366,030.06	4,381,414,943.75	2,644,741,928.75	1,536,987,646.04	10,482,510,548.60
9	Dinas Sosial	2,384,544,555.44	2,489,135,398.47	1,711,036,850.54	1,848,524,025.20	8,433,240,829.65
10	Dinas Tenaga Kerja	1,598,682,993.67	1,982,617,209.77	1,565,171,264.52	1,811,385,583.47	6,957,857,051.43
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,499,345,521.86	2,031,897,331.55	2,171,204,951.88	1,551,355,690.86	7,253,803,496.15
12	Dinas Ketahanan Pangan	2,555,350,220.66	1,849,775,033.09	1,375,441,822.38	1,172,173,128.42	6,952,740,204.55
13	Dinas Lingkungan Hidup	2,596,716,922.88	6,469,482,930.84	1,697,229,539.53	1,964,018,777.84	12,727,448,171.09
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,896,794,971.97	2,464,823,329.13	1,680,341,376.47	2,003,185,660.02	8,045,145,337.59
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4,534,518,125.36	4,066,930,657.16	2,088,812,678.94	2,074,413,095.63	12,764,674,557.09
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1,838,780,391.63	3,967,480,230.96	2,411,311,660.07	1,938,834,319.65	10,156,406,602.31
17	Dinas Perhubungan	10,390,781,551.24	13,786,958,057.29	4,358,666,242.32	6,251,910,890.70	34,788,316,741.55
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	3,879,575,795.60	2,732,400,973.38	2,170,338,953.78	2,636,711,762.46	11,419,027,485.22
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1,405,198,483.52	1,605,266,151.12	1,479,527,091.85	1,409,344,697.52	5,899,336,424.01
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,648,481,599.93	1,837,872,738.76	1,441,356,528.35	2,017,043,167.43	6,944,754,034.47
21	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	4,079,860,079.61	14,054,045,818.49	8,126,740,235.00	3,699,646,674.11	29,960,292,807.21
22	Dinas Perpustakaan	1,454,292,281.76	1,880,975,117.19	1,349,759,369.72	1,196,687,127.76	5,881,713,896.43
23	Dinas Pertanian Dan Perikanan	8,365,178,933.08	12,080,948,705.79	7,376,922,345.92	8,061,022,121.78	35,884,072,106.57
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3,916,005,606.12	7,328,310,385.52	6,103,495,451.38	5,993,419,248.16	23,341,230,691.18
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3,525,874,623.32	4,661,227,185.97	3,239,183,743.98	3,246,337,005.01	14,672,622,558.28
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	451,104,590,683.36	455,167,457,188.48	504,007,953,833.78	584,371,787,273.27	1,994,651,788,978.89
27	Badan Pendapatan Daerah	31,680,210,841.61	31,051,736,282.40	36,355,816,675.03	27,399,918,588.41	126,487,682,387.45
28	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	5,902,196,539.20	2,431,936,636.82	2,379,676,399.38	2,104,514,441.80	12,818,324,017.20

NO	NAMA PD	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	JUMLAH
29	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	695,702,320.80	888,469,216.30	1,207,144,216.20	696,980,120.80	3,488,295,874.10
30	Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah	148,406,304.27	160,136,688.16	160,136,708.65	149,069,104.27	617,748,805.35
31	Sekretariat Daerah	21,974,522,980.24	24,292,368,588.42	20,140,440,290.14	15,623,457,449.26	82,030,789,308.06
32	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	18,939,102,515.00	14,929,318,374.63	12,383,853,026.26	13,334,071,604.50	59,586,345,520.39
33	Inspektoral	2,392,368,038.00	2,469,923,213.88	2,046,233,537.00	2,508,278,022.00	9,416,802,810.88
34	Kecamatan Rengat	2,339,143,635.20	5,113,385,794.44	3,769,119,109.39	6,725,872,910.64	17,947,521,449.67
35	Kecamatan Rengat Barat	1,130,714,911.22	1,852,744,287.58	1,772,842,607.13	1,908,430,838.22	6,664,732,644.15
36	Kecamatan Seberida	1,203,089,549.86	1,480,244,649.95	1,446,974,582.42	1,867,020,179.86	5,997,328,962.09
37	Kecamatan Batang Gansal	775,108,771.52	793,353,586.48	811,389,034.30	774,251,180.52	3,154,102,572.82
38	Kecamatan Batang Cenaku	745,520,025.01	1,005,591,419.11	1,010,538,158.46	869,234,300.01	3,630,883,902.59
39	Kecamatan Lirik	697,980,821.68	763,375,567.43	790,632,019.47	714,817,986.68	2,966,806,395.26
40	Kecamatan Pasir Penyau	1,775,155,186.51	3,049,721,387.68	3,012,162,745.17	5,391,795,090.40	13,228,834,409.76
41	Kecamatan Kelayang	916,256,490.10	1,795,088,018.52	860,461,122.61	1,175,563,633.10	4,747,369,264.33
42	Kecamatan Peranap	1,003,790,821.32	1,973,058,047.93	1,478,917,767.41	2,011,886,984.32	6,467,653,620.98
43	Kecamatan Kuala Cenaku	688,756,536.81	1,050,848,470.12	842,782,025.76	853,971,939.31	3,436,358,972.00
44	Kecamatan Sungai Lala	687,140,875.32	785,752,089.50	747,555,115.92	648,611,766.32	2,869,059,847.06
45	Kecamatan Rakit Kulim	857,758,569.72	651,100,423.85	688,579,062.35	665,035,845.26	2,862,473,901.18
46	Kecamatan Batang Peranap	957,971,173.10	635,726,138.20	517,451,753.28	572,864,629.54	2,684,013,694.12
47	Kecamatan Lubuk Batu Jaya	552,796,355.55	759,529,224.18	700,740,787.10	695,196,151.54	2,708,262,518.37
	<b>TOTAL</b>	<b>849,674,508,200.59</b>	<b>955,622,703,302.31</b>	<b>922,904,940,419.42</b>	<b>926,110,645,466.68</b>	<b>3,654,312,797,389.00</b>

<b>PARAF KOORDINASI</b>		<b>PARAF KOORDINASI</b>	
KABAG HUKUM	<i>dyg</i>	KEPALA DINAS .....	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	<i>✓</i>
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

*BUPATI*  
BUPATI INDRAGIRI HULLU



*H. YUPI ARIANTO*  
H. YUPI ARIANTO

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
ANGGARAN KAS PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA PD	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	91,513,667,271.26	119,945,738,370.32	166,263,739,328.90	111,697,777,646.56	489,420,922,617.04
2	Dinas Kesehatan	38,932,021,349.92	39,544,778,009.53	31,432,938,632.53	30,469,253,042.77	140,378,991,034.75
3	RSUD Indrasari Rengat	17,115,150,084.18	29,706,469,938.60	17,997,568,834.41	17,625,014,390.25	82,444,203,247.44
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	68,703,411,729.17	92,417,175,190.02	30,802,447,216.77	18,908,933,410.58	210,831,967,546.54
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2,827,136,416.26	6,453,217,279.34	2,551,609,937.95	2,650,965,782.76	14,482,929,416.31
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,783,403,449.67	1,906,161,693.59	1,267,711,677.63	1,404,949,932.11	6,362,226,753.00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	5,246,103,394.03	5,980,753,455.63	5,570,260,305.65	4,965,988,720.53	21,763,105,875.84
8	Kantor Penanggulangan Bencana Daerah	1,919,366,030.06	4,381,414,943.75	2,644,741,928.75	1,536,987,646.04	10,482,510,548.60
9	Dinas Sosial	2,384,544,555.44	2,489,135,398.47	1,711,036,850.54	1,848,524,025.20	8,433,240,829.65
10	Dinas Tenaga Kerja	1,598,682,993.67	1,982,617,209.77	1,565,171,264.52	1,811,385,583.47	6,957,857,051.43
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,499,345,521.86	2,031,897,331.55	2,171,204,951.88	1,551,355,690.86	7,253,803,496.15
12	Dinas Ketahanan Pangan	2,555,350,220.66	1,849,775,033.09	1,375,441,822.38	1,172,173,128.42	6,952,740,204.55
13	Dinas Lingkungan Hidup	2,596,716,922.88	6,469,482,930.84	1,697,229,539.53	1,964,018,777.84	12,727,448,171.09
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,896,794,971.97	2,464,823,329.13	1,680,341,376.47	2,003,185,660.02	8,045,145,337.59
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4,534,518,125.36	4,066,930,657.16	2,088,812,678.94	2,074,413,095.63	12,764,674,557.09
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1,838,780,391.63	3,967,480,230.96	2,411,311,660.07	1,938,834,319.65	10,156,406,602.31
17	Dinas Perhubungan	10,266,911,551.24	13,665,008,057.29	4,236,716,242.32	6,129,960,890.70	34,298,596,741.55
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	3,879,575,795.60	2,732,400,973.38	2,170,338,953.78	2,636,711,762.46	11,419,027,485.22
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1,405,198,483.52	1,605,266,151.12	1,479,527,091.85	1,409,344,697.52	5,899,336,424.01
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,648,481,599.93	1,837,872,738.76	1,441,356,528.35	2,017,043,167.43	6,944,754,034.47
21	Dinas Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata	4,069,860,079.61	14,049,045,818.49	8,109,240,235.00	3,692,146,674.11	29,920,292,807.21
22	Dinas Perpustakaan	1,454,292,281.76	1,880,975,117.19	1,349,759,369.72	1,196,687,127.76	5,881,713,896.43
23	Dinas Pertanian Dan Perikanan	8,307,983,933.08	12,023,753,705.79	7,319,727,345.92	8,003,827,121.78	35,655,292,106.57
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3,590,334,606.12	7,002,639,385.52	5,777,824,451.38	5,596,720,048.16	21,967,518,491.18
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3,525,874,623.32	4,661,227,185.97	105,585,226,898.24	3,246,337,005.01	14,672,622,558.28
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	112,037,463,747.86	104,224,330,252.94	4,041,690,625.03	217,399,606,356.85	539,246,627,255.89
27	Badan Pendapatan Daerah	5,886,244,007.61	5,148,589,448.40	4,041,690,625.03	3,685,441,362.41	18,761,965,443.45
28	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	5,902,196,539.20	2,431,936,636.82	2,379,676,399.38	2,104,514,441.80	12,818,324,017.20
29	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	695,702,320.80	888,469,216.30	1,207,144,216.20	696,980,120.80	3,488,295,874.10
30	Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah	148,406,304.27	160,136,688.16	160,136,708.65	149,069,104.27	617,748,805.35



NO	NAMA PD	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	JUMLAH
31	Sekretariat Daerah	21,914,022,980.24	24,231,868,588.42	20,079,940,290.14	15,562,957,449.26	81,788,789,308.06
32	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	18,939,102,515.00	14,929,318,374.63	12,383,853,026.26	13,334,071,604.50	59,586,345,520.39
33	Inspektorat	2,392,368,038.00	2,469,923,213.88	2,046,233,537.00	2,508,278,022.00	9,416,802,810.88
34	Kecamatan Rengat	2,339,143,635.20	5,113,385,794.44	3,769,119,109.39	6,725,872,910.64	17,947,521,449.67
35	Kecamatan Rengat Barat	1,130,714,911.22	1,852,744,287.58	1,772,842,607.13	1,908,430,838.22	6,664,732,644.15
36	Kecamatan Seberida	1,203,089,549.86	1,480,244,649.95	1,446,974,582.42	1,867,020,179.86	5,997,328,962.09
37	Kecamatan Batang Gansal	775,108,771.52	793,353,586.48	811,389,034.30	774,251,180.52	3,154,102,572.82
38	Kecamatan Batang Genaku	745,520,025.01	1,005,591,419.11	1,010,538,158.46	869,234,300.01	3,630,883,902.59
39	Kecamatan Lirik	697,980,821.68	763,375,567.43	790,632,019.47	714,817,986.68	2,966,806,395.26
40	Kecamatan Pasir Penyuu	1,775,155,186.51	3,049,721,387.68	3,012,162,745.17	5,391,795,090.40	13,228,834,409.76
41	Kecamatan Kelayang	916,256,490.10	1,795,088,018.52	860,461,122.61	1,175,563,633.10	4,747,369,264.33
42	Kecamatan Peranap	1,003,790,821.32	1,973,058,047.93	1,478,917,767.41	2,011,886,984.32	6,467,653,620.98
43	Kecamatan Kuala Genaku	688,756,536.81	1,050,848,470.12	842,782,025.76	853,971,939.31	3,436,358,972.00
44	Kecamatan Sungai Lala	687,140,875.32	785,752,089.50	747,555,115.92	648,611,766.32	2,869,059,847.06
45	Kecamatan Rakit Kulim	857,758,569.72	651,100,423.85	688,579,062.35	665,035,845.26	2,862,473,901.18
46	Kecamatan Batang Peranap	957,971,173.10	635,726,138.20	517,451,753.28	572,864,629.54	2,684,013,694.12
47	Kecamatan Lubuk Batu Jaya	552,796,355.55	759,529,224.18	700,740,787.10	695,196,151.54	2,708,262,518.37
	<b>TOTAL</b>	<b>467,340,196,558.10</b>	<b>561,310,131,659.78</b>	<b>474,689,289,560.89</b>	<b>517,868,011,245.23</b>	<b>2,021,207,629,024.00</b>

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM		KEPALA DINAS .....	
KEPALA BAGIAN .....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN .....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

BUPATI INDRAGIRI HULLU


H. YUPI ARIANTO

5.2.00



NO	Kode PD	Nama PD	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah
40	5.06.12.00	Kecamatan Pasir Penyu	612,841,052.91	588,989,066.80	573,325,066.80	617,681,066.80	896,634,460.08	1,535,405,851.80	961,993,746.57	1,370,327,131.80	679,841,866.80	3,711,864,596.77	1,151,339,246.77	528,591,246.86	13,228,834,409.76
41	5.06.13.00	Kecamatan Keluyang	251,035,163.70	244,572,363.70	420,648,962.70	375,391,163.70	1,150,347,891.12	289,348,963.70	299,837,195.21	348,552,363.70	212,071,563.70	744,547,927.70	215,608,177.70	215,407,527.70	4,747,369,264.33
42	5.06.14.00	Kecamatan Peranap	246,990,400.44	259,001,750.44	497,798,670.44	374,904,880.44	1,022,799,917.05	575,362,250.44	787,408,666.53	384,848,300.44	306,660,800.44	1,493,366,828.09	265,255,828.09	253,264,328.14	6,467,653,620.98
43	5.06.15.00	Kecamatan Kuala Cenaku	203,722,412.27	242,916,012.27	242,118,112.27	404,064,762.27	336,139,695.58	310,646,012.27	394,949,551.22	210,329,362.27	237,943,112.27	431,392,779.81	207,659,129.75	214,920,029.75	3,436,358,972.00
44	5.06.16.00	Kecamatan Sungai Lela	192,827,992.44	241,189,992.44	253,122,890.44	297,517,793.82	391,580,003.24	196,654,292.44	398,837,831.04	206,881,292.44	141,835,292.44	313,345,788.77	189,868,980.77	145,396,996.78	2,869,059,847.06
45	5.06.17.00	Kecamatan Bukit Kulim	309,402,399.42	383,003,170.88	165,352,999.42	202,839,899.42	263,826,525.01	184,433,999.42	365,727,863.51	181,882,599.42	140,968,599.78	351,345,295.08	156,942,175.08	156,748,375.10	2,862,473,901.18
46	5.06.18.00	Kecamatan Bahang Peranap	282,781,390.18	328,580,712.74	346,609,130.18	314,102,818.85	232,015,677.84	220,179,130.18	251,793,492.92	123,679,130.18	141,979,130.18	321,932,009.84	126,066,309.84	124,866,309.86	2,684,013,694.12
47	5.06.19.00	Kecamatan Lubuk Batu Jawa	174,601,717.85	176,392,018.85	201,802,618.85	183,531,330.18	258,606,786.48	186,819,618.85	270,921,549.40	193,097,118.85	236,722,118.85	329,279,983.85	203,406,883.85	192,509,283.84	2,708,262,518.37
<b>TOTAL</b>			<b>77,615,012,113.29</b>	<b>151,867,573,912.59</b>	<b>237,857,610,532.22</b>	<b>140,466,760,713.20</b>	<b>194,501,186,952.07</b>	<b>226,342,183,994.51</b>	<b>199,374,909,236.29</b>	<b>82,992,514,268.26</b>	<b>192,321,866,056.34</b>	<b>317,781,111,061.83</b>	<b>106,691,684,209.66</b>	<b>93,395,215,973.74</b>	<b>2,021,207,629,024.00</b>

<b>PARAF KOORDINASI</b>		<b>PARAF KOORDINASI</b>	
KABAG HUKUM	<i>Dksp</i>	KEPALA DINAS .....	
KEPALA BAGIAN .....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN .....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR SSUD	<i>✓</i>

  
**H. YOPRI ARIANTO**

1200k